

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari dua belas pernyataan standar akuntansi pemerintah, yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Salah satu diantara dua belas pernyataan standar akuntansi tersebut, terdapat satu standar yang secara khusus mengatur tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, standar akuntansi pemerintah tersebut adalah pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu unsur yang penting dalam Laporan Keuangan, dimana Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (PSAP No. 02 paragraf 5).

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

dimana Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas dan Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah (PSAP No.02 paragraf 1-4).

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah instansi pemerintah yang bertugas membuat dan memperbaiki sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang dituntut untuk maju dan berkembang. Dalam hal ini, pembangunan senantiasa harus mengacu pada suatu perencanaan yang dijabarkan dalam pola dasar pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah/panjang dan rencana jangka pendek, Arah Kebijakan Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Kebijakan perencanaan tidak lepas dari sumber pembiayaan yang tersedia maupun yang direncanakan dan urutan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran sering sekali terjadi, dimana adanya anggaran belanja yang tidak direalisasikan. Seperti halnya salah satu masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ini adalah tidak terlaksananya proyek yang direncanakan sesuai dengan target atau terjadinya penyimpangan proyek yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI No. 81/LHP/XVII>PLG/12/2018 menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan bahwa adanya beberapa permasalahan yang terkait proses lelang

yang tidak kompetitif yaitu adanya pengurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah dalam pekerjaan pembangunan jembatan kedukan Aur 2 yang dilaksanakan PT GU diketahui pekerjaan ini mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda sebesar Rp 587.197.560,00 dan dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama dengan pihak terkait menemukan adanya kekurangan volume pada 7 paket pekerjaan sebesar Rp 3.461.958.214.

Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan realisasi anggaran dimana masih sering terjadinya anggaran yang tidak terealisasi pada tahun anggaran berjalan. Hal tersebut juga dapat menjadi penyebab kurang efektifnya dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sehingga penyajian laporan keuangan kurang tepat waktu, karena manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktunya.

Untuk mengetahui kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut, diperlukan evaluasi atas hasil dan proses kegiatan penganggaran. Hasil dan proses penganggaran antara lain laporan realisasi anggaran, proses penyusunan anggaran dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan PSAP No.02 Tentang laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada penyesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas di tahun 2018. Pembatasan ini penulis lakukan karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu serta data penulis miliki dengan hasil yang akan diperoleh.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sudah sesuai atau belum dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02.

1.5 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat:

1. Memperkaya kajian empiris, tentang Akuntansi Sektor Publik, terutama mengenai PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
2. Sebagai masukan bagi pihak pengelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis kas agar sesuai dengan PSAP No. 02.
3. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat pada kajian yang sama.

